

PELATIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN MASYARAKAT DI DESA NANSEAN

Handrianus Vianey Melin Wula¹⁾, Elpius Kalembang²⁾, Melkianus Suni³⁾

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Timor, Indonesia^{1),2),3)}

Pos-el : handrywula@unimor.ac.id

Dikirim: 14,08,2020

Direvisi: 25,08,2020

Diterbitkan: 31, 08,2020

Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat desa tentang administrasi pemerintahan desa dan mendorong tertib administrasi pelayanan desa pada Desa Nansaan Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode pengabdian yang digunakan adalah melalui *Participatory Learning And Action* yakni menyampaikan materi tentang administrasi pemerintahan desa, menunjukkan dan memandu aparatur desa dalam membuat buku administrasi pemerintahan desa sesuai dengan panduan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini yakni aparatur Desa Nansaan dapat mengetahui tentang tata cara mengelola administrasi pemerintahan desa dengan baik dan tertip yang akan menghasilkan data dan informasi yang akurat dan lengkap.

Kata Kunci: Administrasi Pemerintahan Desa, Peningkatan Kapasitas

Abstract

This Community Service aims to increase the capacity of village officials and communities regarding village government administration and encourage the orderly village service administration in Nansaan Village, Insana District, North Central Timor Regency. The service method used is through Participatory Learning and Action, which is delivering material about village government administration, showing and guiding village officials in making village government administration books according to the guidelines. The result of this service activity is that the Nansaan Village apparatus can find out about the procedures for managing the village government administration properly and most accurately which will produce accurate and complete data and information.

Keywords: Village Government Administration, Capacity Building

PENDAHULUAN

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014). Sebagai bagian dari Pemerintahan Pusat, penyelenggaraan pemerintah Desa dalam konteks Indonesia diatur oleh perundang-undangan. Saat ini pengaturannya didasarkan pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan merujuk pada undang-undang tersebut, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan terutama oleh Pemerintah Desa lebih khusus lagi oleh Kepala Desa karena dialah yang menjadi pemimpin di desa baik secara formal maupun informal.

Modal sosial masyarakat berupa nilai-nilai tradisional, kearifan lokal, sosial dan budaya dan kehidupan gotong royong merupakan kohesi masyarakat dalam menghadapi permasalahan ditengah perubahan dan dinamika global. Meskipun demikian kekuatan modal sosial tersebut perlu didukung dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan laporan keuangan desa yang tertib dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dan dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan laporan keuangan desa yang tertib tersebut diperlukan aparatur pemerintahan desa dan masyarakat yang mampu dan memiliki kapasitas.

Berdasarkan hasil analisis situasi sosial ditemukan permasalahan masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan penyusunan kebijakan desa dan manajemen pelayanan desa dan minimnya kemampuan tenagapengelola keuangan desa sehingga menghambat penyusunan perencanaan keuangan desa. Dalam hal ini keberadaan pendamping desa sebagai tenaga fasilitator desa masih belum dapat memberikan daya dukung terhadap peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang ada di desa baik dari administrasinya, tata kelola keuangan desa demi menjadikan tertip administrasi desa dan akan menjadi bank data dan informasi pada penyelenggaraan pemerintahan di desa, kegiatan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan pada masyarakat. Oleh karena itu perlu di tawarkan suatu kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan administrasi pemerintahan desa. Maka solusi yang ditawarkan adalah mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat bekerjasama dengan aparatur desa dan masyarakat di desa Naensean. Hal ini juga diharapkan adanya partisipasi dengan kesadaran dari masyarakat dan aparatur desa tentang adanya kesempatan dan adanya kemauan atau inisiatif untuk bertindak dengan komitmen (Ariyani, 2007 dalam Handrianus, 2018) terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan keterampilan aparatur dan masyarakat desa tentang administrasi pemerintahan desa dan mendorong tertibnya administrasi pelayanan desa.

METODE

Secara metodologi pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini di rancang dan dilaksanakan melalui *Participatory Learning And Action* yang merupakan suatu metode yang baru dari pemberdayaan masyarakat yang awalnya di sebut dengan *Learning by Doing* atau belajar sambil bekerja (Phuyal, 2008; IIED, 2013 dalam Mardikanto, 2013).

Participatory Learning Action adalah suatu cara belajar dengan berkelompok secara interaktif pada proses kerja (Appel dkk, 2012). Kegiatan ini dilakukan dengan cara ceramah, diskusi, curah pendapat yang sesuai dengan materi pemberdayaan masyarakat (Theresia, 2014). Berikut merupakan tahapan kegiatan pengabdian di Desa Nensean, Kecamatan Insana, Timor Tengah Utara:

Tahap I :

- Persiapan

Tahap II :

- Pelaksanaan kegiatan

Tahap III

- Penyusunan laporan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan survey dan wawancara untuk untuk mengetahui persoalan yang di alami oleh desa supaya di cari jalan keluar bagi persoalan tersebut.Pada tahap ini dilakukan wawancara kepada kepala desa Nansean dan sekretaris desa Nansean yang diketahui bahwa desa Nansean masih mengalami persoalan dalam membuat administrasi desa sehingga dibutuhkan suatu kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang model buku administrasi desa.

Selanjutnya mempersiapkan kelengkapan administrasi sebagai prosedur formal dengan mengurus surat ijin pelaksanaan pengabdian dan membuat suatu rancangan berupasuat model panduan untuk melaksanakan kegiatan inti yang tentunya akan menjawab permasalahan tentang buku administrasi desa.

2. Pelaksanaan kegiatan

a. Sosialisasi

Pada tahap ini di berikan pemahaman kepada masyarakat dan aparat desa tentang pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa pada administrasi desa. Kegiatan PKM dilakukan tanggal 23-25Juli 2020, bersama dengan mahasiswa yang dihadiri oleh kepala desa dan aparatur desa serta tokoh masyarakat.

b. Pembelajaran Teori

Tahapan ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan praktek terhadap aparat desa dengan menggunakan beberapa alat bantu ajar berupa bahan latihan yang dibagikan kepada peserta dan materi disampaikan melalui media LCD.Kegiatan ini di ikuti oleh 15 orang terdiri dari apatar desa dan tokoh masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan supaya aparat desa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam mengisi model-model buku administrasi yang digunakan di desa Nansean.

Berikut merupakan rincian materi tentang administrasi pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 yang berupa model-model buku administrasi desa dan cara pengisiannya terdiri dari beberapa bagian yakni; Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, dan Administrasi Lainnya.

Pada kegiatan ceramah, diskusi dan praktek ini juga bertujuan supaya aparat desa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam mengisi model-model buku administrasi yang akan digunakan di Desa Nansean.



Gambar 1: Penyampaian Materi Administrasi Pemerintahan Desa

3. Laporan Kegiatan

Untuk mengukur tercapainya tujuan kegiatan ini tentunya dilihat dari beberapa indikator: a) terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pelatihan, b) Timbulnya motivasi aparat desa untuk melaksanakan administrasi pemerintahan desa secara lengkap c) peningkatan kapasitas dan kemampuan aparat desa Nansean.

Berdasarkan target luaran kegiatan pengabdian pada masyarakat telah dihasilkan model-model buku administrasi desa, yakni:

1. Buku Administrasi Umum (Model A1-A8)

- MODEL A.1. Data Peraturan Desa
- MODEL A.2. Data Keputusan Kepala Desa
- MODEL A.3. Data Inventaris Desa
- MODEL A.4. Data Aparat Pemerintah Desa
- MODEL A.5. Buku Data Tanah Desa/Tanah KasDesa
- MODEL A.6. Data Tanah Di Desa
- MODEL A.7. Buku Agenda
- MODEL A.8. Buku Ekspedisi

2. Buku Administrasi Penduduk (Model B1-B4)

- MODEL B.1. Buku Data Induk Penduduk
- MODEL B.2. Buku Data Mutasi Penduduk
- MODEL B.3. Buku Data Rekapitulasi Penduduk
- MODEL B.4. Buku Data Penduduk Sementara

3. Buku Administrasi Keuangan Desa (Model C1-C3)

- MODEL C.1.a. Anggaran Penerimaan
- MODEL C.1.b. Anggaran Pengeluaran Rutim
- MODEL C.1.c. Anggaran Pengeluaran
Pembangunan
- MODEL C.2. Buku Kas Umum
- MODEL C.3.a. Buku Kas Pembantu Penerimaan
- MODEL C.3.b. Buku Kas Pembantu Pengeluaran

Rutin

MODEL C.3.c. Buku Kas Pembantu Pengeluaran
Pembangunan

4. Buku Administrasi Pembangunan (Model D1-D4)

MODEL D.1. Buku Rencana Pembangunan

MODEL D.2. Buku Kegiatan Pembangunan

MODEL D.3. Buku Inventaris Proyek

MODEL D.4. Buku Kader-Kader Pembangunan

5. Buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa

(Model E1-E4)

MODEL E.1. Buku Data Anggota BPD

MODEL E.2. Buku Data Keputusan BPD

MODEL E.3. Buku Data Kegiatan BPD

MODEL E.4.a. Buku Data Agenda BPD

MODEL E.4.b. Buku Ekspedisi



Gambar 2: Praktek Pengisian Buku Administrasi Desa

SIMPULAN

Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat desa Nansean cukup memiliki respon yang antusias pada pada setiap kegiatan pengabdian pada masyarakat, karena menyadari betapa pentingnya tertib administrasi desa. Padatahap intidari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara ceramah, diskusi yang materinya

tentang administrasi pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016.

Demi tercapainya tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yakni untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan masyarakat dan aparatur Desa Nansean tentang tertib administrasi desa maka dilakukan jugapraktek cara pengisian model-model buku administrasi desa. Dan pada kegiatan ini juga telah menghasilkan model-model buku administasi desa yang akan digunakan oleh aparatur desa dalam menatausahakan adminitrasi di Desa Nansean.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian,tim pengabdian memberikan saran sebagai berikut:

1. Buat aparatur Desa Nansean untuk secara konsisten dan berlanjut dalam pengisian data informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai sesuai buku administrasi desa yang sudah dibuat.
2. Untuk diadakan kegiatan pelatihan administrasi desa secara rutin dan berlanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pemerintahan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Nansean untuk kesempatan dan waktunya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Timor yang telah memberi dukungan anggaran terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Handrianus V. M Wula & Hina Pari. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pembangunan Desa Studi Kasus Dana Desa Di Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Transformatif Unkriswina, Volume 8 Nomor 1.
- Lembaga Administrasi Negara, 2009. *Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa*, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Jakarta.
- Mardikanto T dan Soebiato P, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Theresia, Aprillia, at al, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung, Alfabeta
- Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 *Tentang Administrasi Pemerintahan Desa*